



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMIR HUSNI
2. Jabatan : KETUA PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN
3. NHK : 1011693

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/90 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 199 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 523 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 1.860 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 374 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 50.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 254 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 149.000.000

1. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, SUZUKI ALL NEW ERTIGA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	115.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.217.800.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.217.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.